

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintahan Daerah. Makassar : Graha Ilmu.
- Darise, Nurlan. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta : PT.Indeks.
- Due, Jhon F. 1968. Keuangan Negara: Perekonomian Dari Sektor Publik. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Erlina dan Rasdianto. 2013. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis AkruaI. Medan : Brama Ardian.
- Faisal, Heri. 2015. APBD 2015, Serapan Belanja Modal Mengkhawatirkan Dikutip dari artikel <http://finansial.bisnis.com/read/20150908/10/470103/apbd-2015-serapan-belanja-modal-mengkhawatirkan>.
- Fikri, Ahmad. 2015. Serapan APBD Jawa Barat Baru 36 Persen. Dikutip dari artikel <http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/08/25/090694894/serapan-apbd-jawa-barat-baru-36-persen>.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS IBM SPSS19. Edisi 5. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah, Edisi Revisi, Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi. Jakarta : Salemba Empat.
- KBBI. 2017. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses pada bulan September 2017 melalui <https://kbbi.web.id/> (online).
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Penerbit Andi Offset.
- Margono. 2010. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marlia, Rima. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah . Junral akuntansi. Universitas Komputer Indonesia.
- Narimawati, Umi. 2010. Penulisan Karya Ilmiah. Jakarta: Penerbit Genesis.
- Nazir, Mohammad. 2011. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nordiawan, Deddi dkk. 2012. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta : Salemba Empat.

Nuryaman dan Veronica Cgristina. 2015. Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis Teori dan Praktek. Bogor : Ghalia Indonesia.

_____Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

_____Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Putro, Nugroho Suratno. 2010. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro.

Sasana, Hadi. 2011. Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Maret 2011. Vol.18, No.1. ISSN: 1412-3126. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro. Semarang.

Siregar, Doli D. 2004. Manajemen Aset : Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional DALAM Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's. Jakarta : Gramedia.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung : Alfabeta

Sumarmi, Saptaningsih. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta. Jurnal. Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Yogyakarta.

Susanti, Susi dan Heru Fahlevi. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). Vol. 1, No. 1, (2016). Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Syiah Kuala.

Susetyo, Dino Rian Verri. 2014. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi. Universitas Muhammadiyah. Surakarta.

Syaukani, dkk. 2009. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

_____Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

_____Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

Wandira, Arbie Gugus. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia. ISSN 2252-6765.

Wertianti, I G A Gede dan A.A.N.B. Dwirandra. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pada Belanja Modal Dengan Pad dan DAU Sebagai variabel Moderasi. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 4.3 (2013): 567-584. ISSN: 2302-8556.

Widjaja, Haw. 2009. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta : Rajawali Pers.

Wijanarko, Yusuf. 2013. Realisasi Belanja Modal Pemprov Jabar Dinilai Masih Sangat Kecil. Dikutip dari artikel <http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2013/05/14/234780/realisasi-belanja-modal-pemprov-jabar-dinilai-masih-sangat-kecil>.

Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.